

Tarik-Ulur Mengusut Kelangkaan Minyak Goreng

Usul PKS agar DPR membentuk pansus kelangkaan minyak goreng menuai pro dan kontra. Politikus Golkar menilai pansus diperlukan untuk mengusut dugaan penimbunan dan mafia minyak goreng. Sebaliknya, politikus PDIP, PPP, dan NasDem menganggap pansus hanya akan menimbulkan kegaduhan baru.

EDISI, 22 MARET 2022



VINDRY FLORENTIN

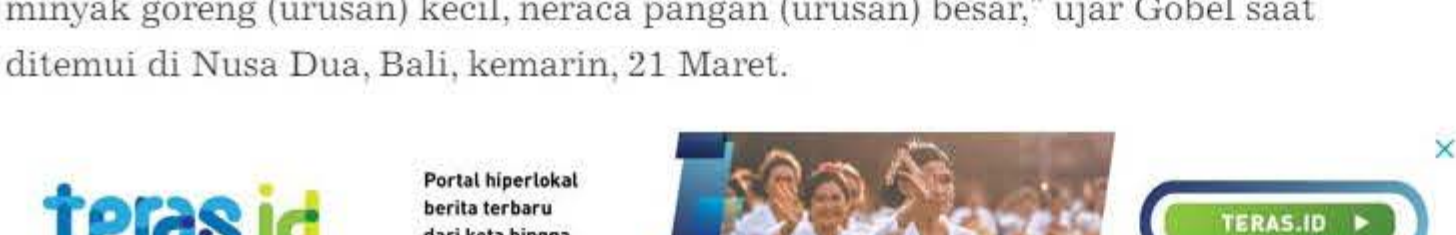


Penjualan minyak dalam kemasan di salah satu Pusat Perbelanjaan di Jakarta, 17 Maret 2022. Tempo/Tony Hartawan

- Rachmat Gobel berpendapat pemerintah dan DPR lebih baik membahas neraca pangan.
- PPP menilai masalah minyak goreng cukup diselesaikan dengan membentuk panja.
- Stok di tiga daerah berlebih, tapi minyak goreng tetap langka.

NUSA DUA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Rachmat Gobel menolak usul Partai Keadilan Sejahtera agar DPR membentuk panitia khusus (pansus) kelangkaan [minyak goreng](#). Ia berpendapat, Dewan seharusnya tidak lagi membicarakan [harga minyak goreng](#), melainkan topik yang lebih luas ihwal neraca pangan nasional.

"DPR akan duduk bersama pemerintah membicarakan neraca pangan. Kalau minyak goreng (urusan) kecil, neraca pangan (urusan) besar," ujar Gobel saat ditemui di Nusa Dua, Bali, kemarin, 21 Maret.



DPR, ucap mantan Menteri Perdagangan ini, bisa mengundang Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, ataupun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kehadiran Menteri Perindustrian diperlukan untuk membicarakan peningkatan nilai tambah produk pangan dan membangun ketahanan pangan.

Selanjutnya, Menteri Pertanian akan mendengarkan penjelasannya mengenai potret pertanian nasional. Adapun Kementerian ESMD akan mendiskusikan ihwal ketersediaan pupuk dan gas. "Rapat bersama pemerintah akan kita laksanakan sebelum bicara pansus. Kita bicara dulu neraca pangan seperti apa."



Warga antri membeli minyak goreng curah dalam program Distribusi Minyak Goreng HET di Pasar Senen Blok III, Jakarta, 17 Maret 2022. TEMPO/Tony Hartawan

Gobel pun menegaskan bahwa pembentukan pansus merupakan langkah terakhir untuk menyelesaikan persoalan pangan. Sedangkan hal yang paling penting adalah memecahkan persoalan ketersediaan pangan bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESMD, Kementerian Pertanian, hingga industri perbankan dan Bank Indonesia.

Gobel juga menepis tuduhan adanya mafia minyak goreng yang membuat komoditas itu menghilang dari pasar. Dia mengklaim di Indonesia tidak ada mafia pangan. Politikus Partai NasDem itu balik menuding bahwa penyebab kelangkaan minyak goreng adalah kebijakan pemerintah yang salah.

"Mafia pangan tidak ada, yang ada itu kesalahan membuat kebijakan. Namanya pengusaha, ingin cari untung. Melihat ada permintaan peraturanan yang mudah, dia mudah mengecap pihak lain sebagai mafia dan sebaliknya mengevaluasi peraturan-peraturan yang diterbitkan.

Usul pembentukan pansus hak angket minyak goreng dilontarkan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini pada Jumat, 18 Maret lalu. Ia mengatakan fraksinya mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki fenomena kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng.

"Fraksi PKS DPR RI mengusulkan agar dibentuk hak angket DPR terkait dengan persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Insya Allah surat usul ini akan segera dikirim ke pimpinan DPR RI," kata Jazuli dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Jazuli menilai kelangkaan dan mahalnya minyak goreng sangat meresahkan masyarakat. Bahkan masalah ini menimbulkan korban jiwa setelah ada warga yang meninggal saat antri minyak goreng.



Pedagang menyiapkan minyak goreng kemasan di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, 4 Februari 2022. TEMPO/Prima Mula

Usul PKS itu ditolak Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi menilai pembentukan pansus minyak goreng hanya akan menimbulkan kegaduhan politik. "Kasihannya kalau hanya disuguhkan kegaduhan politik. Sekarang yang kita cari adalah solusi, bukan kegaduhan," ujar Baidowi saat dihubungi *Tempo*, Senin, 21 Maret 2022.

PPP menilai masalah ini bisa diselesaikan dengan membentuk panitia kerja (panja) di tingkat komisi. "Di panja bisa lebih fokus, lebih spesifik memanggil pihak-pihak terkait. Beberapa panja terbukti sukses, seperti Panja Jiwasraya. Tidak gaduh, tapi selesai masalahnya," ujar dia.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyebutkan usul Fraksi PKS itu terlalu berlebihan. Argumentasi yang ditawarkan tidak memadai persyaratan untuk mengajukan hak angket dalam Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD3. Sebab, menurut Deddy, kelangkaan minyak goreng dipicu oleh lonjakan harga minyak sawit mentah akibat menurunnya pasokan minyak nabati dunia, krisis energi dunia, dan invasi Rusia ke Ukraina.

Anggota Komisi VI DPR itu menilai masalah yang dihadapi saat ini adalah permasalahan barang demi keuntungan pribadi. "Jadi, jelas sekali bahwa persoalan adalah penegakan hukum yang seharusnya menjadi jawaban jawab banyak pihak, dari bea cukai, kepolisian, kepala daerah, hingga tentu saja Kementerian Perdagangan," kata Deddy.

KORAN TEMPO

DUGAAN KETERLIBATAN MAFIA

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan kelangkaan minyak goreng terjadi karena ulah mafia yang menyelewengkan pasokan. Bekerja sama dengan Kepolisian RI, Lutfi berupaya meringkus mafia minyak goreng.

Indikasi Mafia

- Pemerintah telah mengguayurkan jutaan liter minyak goreng ke pasar.
- Meski pasokan di Sumatera Utara, Surabaya, serta Jakarta melebihi kebutuhan, barang tetap sulit ditemukan.
- Di ketiga wilayah tersebut terdapat industri minyak goreng dan pelabuhan.
- Harga terus melonjak.

Modus Mafia

- Menggunakan minyak goreng rumah tangga untuk kebutuhan industri.
- Menyelundupkan minyak goreng ke luar negeri.

Upaya Pengendalian Pasokan dan Harga

- **19 Januari 2022**
Pemerintah menetapkan harga jual minyak goreng kemasan sederhana Rp 14 ribu per liter.
- **27 Januari 2022**
Pemerintah mewajibkan eksportir minyak sawit mentah dan turunannya memasok kebutuhan domestik (DMO) dengan harga khusus (DPO).
- **1 Februari 2022**
Kebijakan minyak kemasan satu harga dicabut. Pemerintah lalu mengatur harga eceran tertinggi (HET) minyak curah goreng sebesar Rp 11.500 per liter, kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan kemasan premium Rp 14 ribu per liter.
- **10 Maret 2022**
Pemerintah menaikkan DMO dari 25 persen menjadi 30 persen.
- **17 Maret 2022**
Kebijakan HET minyak goreng, DMO, serta DPO dicabut.

SUMBER: KEMENDAG, DIOLAH VINDRY FLORENTIN | DESAIN: KUSWOYO

Wakil Ketua IV DPR Dedi Mulyadi pun menyebut aksi penimbunan sebagai salah satu masalah utama. Sebab, stok minyak yang sempat langka langsung melimpah setelah pemerintah mencabut beberapa aturan, seperti kebijakan harga eceran tertinggi serta ketentuan *domestic market obligation* serta *domestic price obligation* untuk minyak sawit mentah.

"Artinya, ada pihak-pihak yang sengaja menyimpan barang dulu. Setelah dibuka ruang, mereka menjual dengan harga sesuai dengan keinginan," tutur Dedi.

Namun politikus Partai Golkar tersebut mendukung pembentukan panitia khusus kelangkaan minyak goreng. Menurut dia, tim dapat bekerja untuk membuktikan kebenaran atas dugaan-dugaan yang muncul, dari penimbunan hingga mafia seperti yang disebut pemerintah.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dalam rapat bersama Komisi VI DPR pada 17 Maret lalu, menyebut mafia minyak goreng sebagai penyebab kelangkaan. Merujuk pada pantauannya di Sumatera Utara, Surabaya, dan Jakarta, dia menyatakan pasokan minyak goreng yang tersedia di wilayah tersebut sudah melebihi kebutuhan konsumsi. Namun barangnya tidak bisa ditemukan di berbagai pusat belanja.

"Deduksi kami, ada orang yang mengambil kesempatan dalam kesempatan," kata Lutfi. Spekulasinya adalah terdapat pasokan untuk domestik yang bocor ke luar negeri atau pasokan yang seharusnya untuk rumah tangga justru dialirkan ke industri. Sebab, di ketiga wilayah itu terdapat pusat industri dan pelabuhan. Ia menggambar, jika satu kapal tongkang berisi 1 juta liter berlayar dari